



Mobil Dinas Tunggak Pajak Rp 20 Miliar

■ Pemkab Ketapang Tunggakan Tertinggi
■ Pemkot Singkawang Segera Lunasi



Satu di antara alasan menunggak pajak mungkin kendaraan itu sudah tidak berfungsi atau sudah terparkir dengan kondisi yang rusak.

Mahmudah
Kepala Bapenda Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN

- Total tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Barat pada 2019 mencapai Rp 920 miliar lebih.

Hal yang membuat mayoritas tunggakan, sebesar Rp 20.806.155.165 atau Rp 20 miliar lebih berasal dari kendaraan pelat merah atau kendaraan dinas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Tunggakan pajak bukan hanya berasal dari kendaraan pelat merah, namun berasal dari instansi vertikal. Total kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 8.782 unit. Jumlah ini terdiri atas 7.648 unit kendaraan



an pelat merah milik provinsi, Pemkot dan Pemkab. Sementara kendaraan instansi vertikal yang menunggak pajak mencapai 1.135 unit.

Jika diurut, kabupaten/kota yang paling banyak menunggak pajak yakni Ketapang 954 unit, Kapuas Hulu 821 unit, Sintang 789 unit, Provinsi Kalbar 757 unit, Sanggau 605 unit, Sambas 603 unit, Landak 553 unit dan Bengkayang 399 unit. Ada pula Mempawah 369 unit, Singkawang 337 unit, Sekadau 243 unit, Kayong Utara 341 unit, Kubu Raya 219 unit dan terakhir Pontianak 202

■ Bersambung ke hal. 7



Tunggakan Pemda

■ Ketapang	954 unit	■ Bengkayang	399 unit
■ Kapuas Hulu	821 unit	■ Mempawah	369 unit
■ Sintang	789 unit	■ Singkawang	337 unit
■ Provinsi Kalbar	757 unit	■ Sekadau	243 unit
■ Sanggau	605 unit	■ Kayong Utara	341 unit
■ Sambas	603 unit	■ Kubu Raya	219 unit
■ Landak	553 unit	■ Pontianak	202 unit

Tunggakan Instansi Vertikal

■ Singkawang	36 unit
■ Melawi	23 unit
■ Ketapang	16 unit
■ Sintang	15 unit
■ Sambas	9 unit
■ Sanggau	9 unit
■ Landak	6 unit

■ Kalbar & Pontianak	715 unit
■ Kapuas Hulu	61 unit
■ Ketapang	59 unit
■ Sintang	53 unit
■ Sambas	47 unit
■ Sanggau	47 unit
■ Landak	38 unit



Sumber: Bapenda
GRAFIK: ENRO
DATA: ONI



Mobil Dinas Tunggak Pajak Rp 20 Miliar

Sambungan Hal.1

unit.

"Satu di antara alasan menunggak pajak mungkin kendaraan itu sudah tidak berfungsi atau sudah terparkir dengan kondisi yang rusak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, Mahmudah, Senin (24/2).

Alasan lain, lanjutnya, kendaraan dalam status lelang sehingga instansi terkait tidak menganggarkan pajaknya. Padahal menurut Mahmudah, setiap kendaraan yang dilelang harus bebas dari tunggakan pajak.

Pihaknya juga bekerjasama dengan instansi perbendaharaan negara yang mengurus lelang, supaya setiap kendaraan yang dilelang instansi pemerintah wajib lunas pajak terlebih dahulu. "Tidak boleh kendaraan yang dilelang tapi pajaknya tidak lunas. Sehingga menimbulkan kekecewaan pada pemenang lelang nantinya," tambah mantan Pjs Wali Kota Pontianak itu.

Pihaknya akan proaktif mengingatkan instansi pemerintah, guna membayar pajak kendaraan dinas. Banyaknya tunggakan kendaraan dinas, menurutnya mungkin saja, instansi terkait tidak menganggarkan pembayaran pajak, karena mereka menganggap kendaraan sudah rusak dan tidak dipakai. "Selama kendaraan itu masih terdata dan terdaftar wajib membayar pajak," tegas Mahmudah.

Instansi terkait seharusnya, apabila ada kendaraan dinas yang tidak berfungsi dan beroperasi karena mengalami kerusakan harus melaporkan. "Kemudian, sesuai aturan instansi terkait harus menganggarkan pembayaran pajak kendaraan selama masih terdata dan terdaftar," pungkasnya.

modelnya kalau sudah laku. Jadi dilelang langsung dan tidak dipakai lagi," ujarnya, Kamis (27/2).

Cek Data

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Farhan, mengaku baru mengetahui informasi terkait tunggakan pajak kendaraan dinas. Ia pun menegaskan akan segera menindaklanjuti jika data tersebut telah disampaikan ke pihaknya.

"Pertama jujur saya sendiri belum mendapat informasi dan baru ini saya mendengar. Kalau pun ada di dalam pemerintahan Kabupaten Ketapang, kami segera menindaklanjutinya. Yang penting data itu *clear* disampaikan ke kami," kata Farhan kepada *Tribun*, Jumat (28/2).

Selain itu, Farhan juga mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk patuh terhadap peraturan khususnya kepatuhan untuk membayar pajak. "Tentunya pajak itu kan bagi hasil dan akan juga jadi pemasukan bagi kita. Tentunya sudah kewajiban untuk membayarnya," tandas Farhan.

Posisi kedua penunggak pajak kendaraan dinas tertinggi berasal dari Kapuas Hulu. Pj Sekda Kapuas Hulu Hj Linda Purnama memastikan akan melakukan *cross check* data terlebih dahulu. "Untuk masalah kendaraan dinas belum bayar PKB, saya akan *cross check* dulu," ujar Linda melalui WhatsApp, Jumat (28/2).

roda dua atau kendaraan roda empat juga masih banyak yang menunggak. OPD-OPD belum menyelesaikan tanggungjawabnya untuk membayar pajak," kata Hilaria di Sukadana.

Menurut Hilaria, tunggakan kendaraan dinas ini disebabkan kelalaian masing-masing OPD. Hilaria menilai, OPD terlena, sehingga tidak menyadari pajak kendaraan ternyata sudah mati. Ia menegaskan, seluruh OPD mestinya patuh melunasi pajak kendaraan dinas. Pasalnya, hal ini bagian dari ketaatan pengelolaan aset daerah.

"Jadi baik dalam penataan administrasinya dan memenuhi semua kewajiban yang berkaitan dengan aset itu ya sebenarnya harus tetap diikuti. Asas kepatuhannya yang masih kurang," ujar Hilaria.

Langkah sama juga dilakukan Pemkot Singkawang. Sekda Kota Singkawang Sumastro mengatakan, Pemkot Singkawang akan segera mengambil langkah melakukan data ulang dan penerbitan kendaraan dinas yang tunggak pajak tersebut. "Jika sudah didata ulang pajak tunggak akan segera dilunasi. Pemkot harus jadi contoh untuk masyarakat luas pemilik kendaraan," katanya.

Ia memastikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) khususnya Kepala Bidang (Kabid) Aset akan melakukan verifikasi semua kendaraan dinas yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kendaraan dinas yang aktif beroperasi atau kendaraan dinas tak aktif/rusak dan telah masuk daftar akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

sing-masing kendaran dinas yang di lingkungan kerjanya dan segera lunasi kewajiban perpajakan tersebut," imbau Sekda.

Siap Anggaran

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota (BKD) Pontianak Hendro Subekti menjelaskan, setiap OPD di Kota Pontianak sudah disiapkan anggarannya untuk perawatan kendaraan dinas serta pembayaran pajak kendaraan setiap tahunnya.

"Setiap OPD itu ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan termasuk untuk pembayaran pajak-pajaknya," ujarnya.

Ia menerangkan, pihaknya juga telah mengecek seluruh kendaraan dinas yang ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak. Dirinya memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas di BKD Kota Pontianak sudah lunas pembayaran pajaknya. "Saya sudah cek, anak buah saya bilang sudah dibayar semua," ujarnya.

Ia juga telah meminta Kasubdit menginventarisasi data-data kendaraan yang menunggak pajak di setiap OPD di Pemkot Pontianak agar tunggakan pajanya bisa dilunasi. Ia belum mengetahui secara detail sebaran dari 202 unit kendaraan pelat merah yang diidentifikasi menunggak pembayaran pajak.

"Kita akan investarisir semuanya. Karena pengakuan dari SKPD ini yang belum bisa dipastikan, apakah belum atau sudah. Jika sudah ada data yang pasti tentunya bisa segera ditindak lanjuti," ujarnya.



Gubernur Kalbar Sutarmidji juga menyoroti tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemerintah yang mencapai Rp 20 miliar. "Di kantor gubernur juga banyak tidak bayar pajak dan juga di kabupaten/kota di Kabar, jadi mau dilelang. Jadi yang tidak dibayar pajaknya nanti dipikirkan bagaimana

Pendataan juga akan dilakukan Pemkab Kayong Utara. Sekretaris Daerah Kayong Utara Hilaria Yusnani tak menampik masih ada kendaraan dinas yang menunggak pajak. Hilaria mengungkapkan, Bupati Kayong Utara Citra Duani sudah menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut. Bupati Citra telah melayangkan surat resmi ke seluruh OPD. "Jadi apakah itu kendaraan

Mungkin, jelasnya, satu di antara sebabnya yakni pinjam pakai sejak awal Singkawang berdiri dan yang sudah dilelang/dijual dan dihibahkan tetapi belum balik nama.

"Diimbau masing-masing kepala OPD diharapkan melakukan pengecekan ulang ma-

Hendro kembali memastikan, setiap tahunnya selalu ada alokasi anggaran di masing-masing OPD untuk proses perawatan kendaraan dan pembayaran pajak. Sehingga tentu tidak ada alasan jika kendaraan dinas tersebut sampai menunggak bayar pajak. "Kalau sampai ada yang menunggak tentunya itu kelalaian tenaga pengurus barang dan kendaraan di masing-masing OPD," ujarnya. **(oni/dho/ang/del/rul/dan/doi)**